

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta : 1989
- Abdul Latif, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII press
- Adrian Sutedi, 2009 *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Afan Ghafar, *Politik Demokrasi dan Faham Integralistik, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama. 1996
- Armen Yasir. 2008. *Hukum Perundang-Undangan*, Lembaga Penerbitan Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*, Remaja Rosdakarya. 2016
- _____, *Penguatan Pengawasan DPRD*, Remaja Rosdakarya. 2016
- _____, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, Remaja Rosdakarya. 2017
- _____, *Perann Pengawasan DPRD*, Remaja Rosdakarya. 2017
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006

Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Balai Pustaka. Jakarta

Lukman Santisi Az, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2015

M. Laica Marzuki. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas. 1999

Maria farida indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan I*. Kanisius, 2007

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus, Bandung

Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 1990

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007

Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta, Penerbit Faza Media, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012

Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y, 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia. Bandung

Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2005

_____, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Zakaria, *Pergeseran Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999*, USU digital library Medan, 2003



II. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

III.SUMBER LAIN :

Enny Nurbainingsih, *Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 4- Desember 2011, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta. 2011

La Ode Bariun. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015

Lalu Subardi, *Otonomi Daerah Studi tentang Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Terumbu Karang*. Jurnal Konstitusi Volume I No. 1 November 2012

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014